

**LAPORAN
KEUANGAN
BP3TKI (UPT BP2MI)
BANDUNG**

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021

Jl. Soekarno Hatta No. 587 Bandung 40275
Telpon/Fax : 022-7336965/7333212
E-mail : bp3tkibdg@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bandung adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bandung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bandung. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bandung, Januari 2022
Kepala BP3TKI Bandung,

Erwin Rachmat, S.I.K.
Kombes. Pol. NRP. 71110259

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	16
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	22
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	28
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	34
F. Pengungkapan Penting Lainnya	36
VI. Lampiran dan Daftar	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bandung yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bandung, Januari 2022
Kepala BP3TKI Bandung,

Erwin Rachmat, S.I.K.
Kombes. Pol. NRP. 71110259

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bandung Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp106.410.318 atau mencapai 0,00 persen. BP3TKI Bandung tidak ada estimasi Anggaran Pendapatan.

Realisasi Belanja Negara pada periode yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp12.959.125.261 atau mencapai 97.60 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp13.277.856.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021. Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp12.062.127.005 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp138.747.773; Aset Tetap (netto) sebesar Rp11.887.379.232 dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp13.500.000.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp166.723.828 dan Rp12.062.127.005.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp13.326.770.545 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp13.326.770.545. Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp11.250.318 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp13.315.520.227.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp12.138.208.461 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp Rp13.315.520.227 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp13.072.714.943 sehingga Ekuitas Entitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp11.895.403.177.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR BP3TKI BANDUNG LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN TA 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2021		% thd Anggaran	TA 2020
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	106.410.318	0,00	17.117.104
JUMLAH PENDAPATAN		-	106.410.318	0,00	17.117.104
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.2	4.039.796.000	4.006.492.419	99,18	4.401.547.659
Belanja Barang	B.3	9.170.560.000	8.885.739.879	96,89	6.327.187.989
Belanja Modal	B.4	67.500.000	66.892.963	0,00	-
JUMLAH BELANJA		13.277.856.000	12.959.125.261	97,60	10.728.735.648

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

KANTOR BP3TKI BANDUNG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
ASET			
ASET LANCAR			
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.2	-	-
<i>Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)</i>	C.3	-	-
Persediaan	C.4	138,747,773	139,622,123
JUMLAH ASET LANCAR		138,747,773	139,622,123
ASET TETAP			
Tanah	C.5	8,573,442,000	8,573,442,000
Peralatan dan Mesin	C.6	5,618,622,198	5,634,065,741
Gedung dan Bangunan	C.7	3,337,836,167	3,337,836,167
Akumulasi Penyusutan	C.8	(5,642,521,133)	(5,667,078,751)
JUMLAH ASET TETAP		11,887,379,232	11,878,265,157
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.9	98,084,772	110,084,772
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.10	(75,584,772)	(73,269,772)
<i>Piutang Tagihan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)</i>	C.11	22,500,000	36,815,000
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		22,500,000	36,815,000
ASET LAINNYA			
Aset Lain-lain	C.12	996,045,506	987,599,000
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.13	(982,545,506)	(889,751,000)
JUMLAH ASET TETAP		13,500,000	97,848,000
JUMLAH ASET		12,062,127,005	12,152,550,280
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.14	166,723,828	14,341,819
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		166,723,828	14,341,819
JUMLAH KEWAJIBAN		166,723,828	14,341,819
EKUITAS			
EKUITAS			
Ekuitas	C.15	11,895,403,177	12,138,208,461
JUMLAH EKUITAS		11,895,403,177	12,138,208,461
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		12,062,127,005	12,152,550,280

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR BP3TKI BANDUNG LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021	2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.1	4,155,614,042	4,233,131,716
Beban Persediaan	D.2	148,037,200	86,240,335
Beban Barang dan Jasa	D.3	6,272,615,577	5,190,452,867
Beban Pemeliharaan	D.4	391,095,170	238,448,789
Beban Perjalanan Dinas	D.5	2,078,126,668	813,605,452
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.6	278,966,888	360,528,583
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.7	2,315,000	72,659,348
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		13,326,770,545	10,995,067,090
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN		(13,326,770,545)	(10,995,067,090)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.8	82,125,000	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.9	83,160,000	-
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		(1,035,000)	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10	12,285,318	6,121,844
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11	-	1,611,241,100
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non - Operasional		11,250,318	(1,605,119,256)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(13,315,520,227)	(12,600,186,346)
SURPLUS / (DEFISIT) - LO		(13,315,520,227)	(12,600,186,346)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KANTOR BP3TKI BANDUNG (UPT BP2MI)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
EKUITAS AWAL	E.1	12,138,208,461	13,995,430,426
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(13,315,520,227)	(12,600,186,346)
KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	20,564,737
Selisih Revaluasi Aset Tetap		-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		-	20,564,737
JUMLAH		-	20,564,737
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	13,072,714,943	10,722,399,644
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	(242,805,284)	(1,857,221,965)
EKUITAS AKHIR	E.6	11,895,403,177	12,138,208,461

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis BP3TKI Bandung

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Bandung (UPT BP2MI) sebelumnya disebut Balai Antar Kerja Antar Negara (**BALAI AKAN**) yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 23 Tahun 1984. Kemudian berubah menjadi Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI) yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Kep-137/MEN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

Setelah itu Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2006 sesuai amanat UU No. 39 Tahun 2004 dan Peraturan Presiden RI Nomor 90 Tahun 2019 sesuai amanat UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) berkomitmen dengan Visi **“Terwujudnya PMI yang Profesional, Bermartabat dan Sejahtera”**, untuk mewujudkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemanfaatan peluang kerja luar negeri;
2. Meningkatkan pelayanan penempatan PMI yang mudah, murah, cepat dan aman;
3. Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan PMI;
4. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BP3TKI Bandung (UPT BP2MI). Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi

Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

BP3TKI Bandung (UPT BP2MI) menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BP3TKI Bandung (UPT BP2MI) dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari BP3TKI Bandung (UPT BP2MI). Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BP3TKI Bandung (UPT BP2MI) adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan secara khusus direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapata-LO pada BP3TKI Bandung (UPT BP2MI) dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu

dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan / Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan / atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara / DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan / Ganti Rugi (TP / TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP / TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri ;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak	50

Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

A.6. Capaian Output

1. Pencapaian Capaian Output Strategis Satker BP3TKI Bandung

Selama periode Tahun Anggaran 2021, output strategis yang telah dicapai oleh Satker BP3TKI Bandung adalah sebagai berikut:

No	Kode Output Strategis	Uraian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Penyerapan (%)	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian Output (%)
1	3894.EAC.001	Layanan Dkungan Manajemen Satker	1.274.753.000,00	1.164.599.695,00	91,36	1	1	100,00
2	3894.EAE.001	Prasarana Perkantoran	67.500.000,00	66.892.963,00	99,10	5	5	100,00
3	3894.QAA.003	Pelayanan Penempatan PMI non Pemerintah	2.258.555.000,00	2.204.308.744,00	97,60	6425	4722	73,49
4	3894.QAA.004	Pelayanan Pelindungan terhadap PMI	542.736.000,00	480.562.340,00	88,54	105	143	136,19
5	3894.QAA.005	Pemberdayaan PMI purna dan keluarganya	435.720.000,00	429.558.361,00	98,59	100	100	100,00
6	4587.EAA.002	Operasional perkantoran UPT Daerah	8.698.592.000,00	8.620.000,00	0,10	1	1	100,00

2. Refocussing Kegiatan/Realokasi Anggaran Penanganan COVID-19 di Satker BP3TKI Bandung

Dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 pada Satker BP3TKI Bandung melakukan *refocussing* kegiatan/realokasi anggaran untuk program-program sebagai berikut:

1. Penyediaan belanja barang operasional – Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp 90.961.500

No	Beban	Jumlah (Rp)	Keterangan	
			No. Kuitansi di BKU	Nama Toko/Penyedia
a	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19			
1	Masker Medis Onamed	30,870,000	39/KWI/TM/2021	CV. Tunas Mandiri
2	Hand Sanitizer Tube (Merk Softies)	7,020,000	39/KWI/TM/2021	CV. Tunas Mandiri
3	Disinfektan (Merk Jhonson)	9,666,000	39/KWI/TM/2021	CV. Tunas Mandiri
4	Masker 3D Srugical (Merk Softies)	2,400,000	47/KWI/TM/2021	CV. Tunas Mandiri
5	Hand Sanitizer (Merk Softies)	1,216,000	47/KWI/TM/2021	CV. Tunas Mandiri
6	Samg Tangan Latex (Merk Everglove)	1,500,000	47/KWI/TM/2021	CV. Tunas Mandiri
7	Masker	36,055,500	002158	CV. Tunas Mandiri
8	Vitamin	1,536,500	002159	Borma
9	Vitamin	697,500	002160	Apotek Indrayasa
	Jumlah	90,961,500		

2. Realisasi belanja barang non operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 tersebut sebesar Rp 189.438.200

No	Beban	Jumlah (Rp)	Keterangan	
			No. Kuitansi di BKU	Nama Toko/Penyedia
b	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19			
1	Paket Immune Booster (Vit.C, Madu, Habbatusauda, Susu Cair)	77,382,000	38/KWI/TM/2021	CV. Tunas Mandiri
2	Goodie Bag	1,215,000	38/KWI/TM/2021	CV. Tunas Mandiri
3	Rapid Test (38 pegawai)	10,450,000	KU.000029.12.21	RSU Pindad
4	Test Antigen (36 pegawai)	3,960,000	KU.000021.12.21	RSU Pindad
5	Test PCR (2 Pegawai)	3,790,000	002187	Klinik Metro Medika
6	Tes Swab PCR	850,000	002156	Klinik Pratama Maryamat
7	Tes Swab Antigen	10,415,000	002155	Klinik Pratama Maryamat
8	Tes Swab PCR	5,494,000	002144	Klinik Pratama Maryamat
9	Tes Swab Antigen	2,570,000	002145	PMI Kab.Kuningan
10	Tes Swab PCR	3,700,000	001808	RSU Pindad
11	Tes Swab Antigen	14,870,000	001687	RSU Pindad
12	Tes Swab Antigen	1,620,000	000560	RSU Pindad
13	Tes Swab Antigen	105,000	000904	Rajawali Nusindo
14	Tes Swab PCR	907,000	000355	Rs. Advent
15	Tes Swab Antigen	3,730,000	000336	Edelweis
16	Tes Swab Antigen	1,740,000	1388	RS. Hermina
17	Tes Swab Antigen	85,000	002727	Klinik Lima Sehat
18	Tes Swab PCR	800,000	002306	Rs Kartika Kasih
19	Tes Swab PCR	2,430,000	002515	RSU Pindad
20	Tes Swab Antigen	7,093,200	002495	RS. MM Indramayu
	Jumlah	153,206,200		

No	Beban	Jumlah (Rp)	Keterangan	
			No. Kuitansi di BKU	Nama Toko/Penyedia
b	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19			
	Jumlah Sebelum	153,206,200		
21	Tes Swab PCR	460,000	C.328.47117SH	RS. Jakarta Medika
22	Tes Swab Antigen (1 Pegawai)	99,000	1630017	EI Shaddari Lab
23	Tes Swab Antigen (2 Pegawai)	198,000	PL/20210918/0317	Bumame Farmasi
24	Tes Swab Antigen (1 pegawai)	85,000	GRAHAYANA/VIII	kimia farma
25	Tes Swab Antigen (1 Pegawai)	70,000	662	Pratama kirana medika
26	Tes Swab Antigen (6 pegawai)	600,000	21.21.045	Klinik Jalur Farma
27	Tes Swab Antigen (1 Pegawai)	150,000	2109003490	Klinik almira
28	Tes Swab Antigen (1 Pegawai)	85,000	00397	Kimia Farma
29	Tes Swab Antigen (1 Pegawai)	75,000	00398	Klinik Dokter Kita
30	Tes Swab Antigen (5 Orang)	400,000	21.21.740	Klinik Jalur Farma
31	Tes Swab Antigen (1 Pegawai)	85,000	257/KLS/X/2021	Klinik Lima Sehat
32	Tes Swab Antigen (1 Pegawai)	99,000	003490	Klinik Pratama Riung ban
33	Tes Swab PCR	370,000	C/FRM/LAB-ADM/	Klinik Bunga Mas
34	Tes Swab Antigen	75,000	37/KUJP/KW/X/20	Klinik Jasa Farma
35	Tes Swab PCR	825,000	C.409.2111010013	Antigen Bandung
36	Tes Swab Antigen	198,000	2111050133	Klinik Utama Bunga mas
37	Tes Swab PCR	550,000	003940	Prima Husada
38	Tes Swab Antigen	8,000,000	003789	Rs Mata Bandung
39	Tes Swab Antigen (3 pegawai)	920,000	002185	Prima Husada
40	Tes Swab Antigen (1 pegawai)	400,000	002186	Cijawura Sehat
41	Tes Swab Antigen (1 pegawai)	125,000	002188	Metro Medika
42	Tes Swab Antigen (2 Pegawai)	460,000	002216	Prima Husada
43	Tes Swab Antigen (1 pegawai)	150,000	002237	Keluarga Sehat
44	Tes Swab Antigen (1 pegawai)	175,000	002267	Rancaekek Medika
45	Tes Swab PCR (1 Pegawai)	495,000	003326	Prima Husada
46	Tes Swab Antigen (1 pegawai)	99,000	003327	Klinik ArRidha
47	Tes Swab Antigen (11 Pegawai)	1,035,000	003328	Vaxa Antigen
48	Tes Swab Antigen (6 pegawai)	960,000	002305	Jalur Farma
49	Tes Swab Antigen (2 Pegawai)	400,000	002322 - 002323	Siti Azaria
50	Tes Swab Antigen (1 Pegawai)	185,000	002341	Lima Sehat
51	Tes Swab Antigen (2 Pegawai)	2,700,000	002404 - 002418	Jasa Farma
52	Tes Swab Antigen	5,250,000	003157	RSU Pindad
53	Tes Swab Antigen	80,000	003173	Rajawali Nusindo
54	Tes Swab Antigen (1 pegawai)	95,000	004216	Edelweis
55	Tes Swab Antigen (6 pegawai)	480,000	004252	Jalur Farma
56	Tes Swab PCR (15 Pegawai)	4,225,000	004255	Vaxa Antigen
57	Tes Swab PCR (6 orang)	1,650,000	004268	Rs Kartika Kasih
58	Tes Swab PCR (4 Pegawai)	1,100,000	004294	RS Pertamina
59	Tes Swab Antigen (1 pegawai)	85,000	004336	Klinik Lima Sehat
60	Tes PCR (1 Pegawai)	275,000	004337	Farmalab
61	Tes PCR (1 Pegawai)	275,000	004339	Lab klinik
62	Tes Swab Antigen (2 pegawai)	198,000	004351	VIP Medika 1
63	Tes PCR (2 Pegawai)	600,000	004356	Lab klinik
64	Tes Swab Antigen (4 pegawai)	396,000	004407	RS MM Indramayu
65	Tes Swab Antigen (2 pegawai)	170,000	004412	Farmalab
66	Tes PCR (2 Pegawai)	825,000	004418	Antigen Bandung
	Jumlah	189,438,200		

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode yang berjalan, BP3TKI Bandung (UPT-BP2MI) telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan adanya *Refocussing* dan pemotongan anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19, adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan yang merubah anggaran DIPA awal pada Tahun Anggaran 2021 BP3TKI Bandung (UPT BP2MI). Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	2021	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Belanja Pegawai	4,928,018,000	4,039,796,000
Belanja Barang	10,480,640,000	9,170,560,000
Belanja Modal	0	67,500,000
Jumlah Belanja	15,408,658,000	13,277,856,000

Revisi tersebut antara lain berupa pengurangan Pagu Anggaran sebesar Rp2.130.802.000 berupa belanja pegawai sebesar Rp888.222.0000, belanja barang sebesar Rp1.310.080.000 dan penambahan belanja modal sebesar Rp67.500.000. Revisi sebanyak 9 kali baik dari DJA maupun Revisi Kanwil Porv. Jabar dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Revisi Pagu Anggaran Belanja Barang TA. 2021

No	Uraian	Pagu Anggaran		Penambahan/
		Semula	Menjadi	Pengurangan
1	Belanja Pegawai	4,928,018,000	4,039,796,000	(888,222,000.00)
2	Belanja Operasional	2,627,830,000	2,930,782,000	302,952,000.00
3	Belanja Barang Non Operasional	2,077,190,000	1,468,207,000	(608,983,000.00)
4	Belanja Barang Persediaan	224,460,000	147,440,000	(77,020,000.00)
5	Belanja Jasa	2,941,960,000	2,077,905,000	(864,055,000.00)
6	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2,239,540,000	2,145,839,000	(93,701,000.00)
7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	369,660,000	467,887,000	98,227,000.00
Jumlah		15,408,658,000	13,277,856,000	2,130,802,000.00

B. 1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp106.410.318 atau mencapai 0,00 persen. Tidak ada estimasi pendapatan yang di tetapkan pada BP3TKI Bandung. Pendapatan BP3TKI Bandung (UPT BP2MI) berasal dari penerimaan Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Pindahan BMN Lainnya	-	82.125.000	-
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	-	12.000.000	-
Penerimaan Kembali Belanja TAYL	-	12.285.318	-
Jumlah	-	106.410.318	-

Pendapatan penerimaan dengan rincian terdiri dari :

No	NTB	NTPN	Jumlah
1	210107988900	F354361QU7KA665O	10.360.000
2	210108095147	087032G4UTAQOIG0	1.000.000
3	820210208275	0DC358N3DNEHAVG1	1.000.000
4	306018142249	854543CIEO3DM9DT	1.279.500
5	627417141412	D789F6U8E2CVA7NB	645.000
6	210407289476	9A97D0N9V8EV1K9K	1.000.000
7	210407289630	79F5848VUIOGLKVU	1.000.000
8	210510934859	2F72C3CIEO93V7AJ	1.000.000
9	210609275792	ADC7F6U8E2LM6GOB	1.000.000
10	210910601939	CA4090N9V8TUAHLM	1.000.000
11	-	210221301012162	818
12	211008625678	83D3C61QU8F675G8	2.000.000
13	211109756292	F93C17QLTTMV1L2I	2.000.000
14	000000405368	0EFA048VUJDTE5JA	82.125.000
15	211209043202	AD8AD8N3DOCCAJP1	1.000.000
Jumlah			106.410.318

Realisasi Pendapatan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 mengalami kenaikan 521,66 persen dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan pendapatan dari hasil lelang BMN, TGR Piutang lancar setiap bulan dan angsuran pembayaran TGR serta Penerimaan Kembali Belanja Pegawai/Barang TAYL.

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020

URAIAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	82.125.000	-	100,00
Pendapatan Lain-lain	24.285.318	17.117.104	41,88
Jumlah	106.410.318	17.117.104	521,66

*Realisasi Belanja
Negara
Rp12.959.125.261*

B. 2 Belanja

Realisasi Belanja instansi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp12.959.125.261 atau 97,60 persen dari anggaran belanja sebesar Rp13.277.856.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021

URAIAN	2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	4.039.796.000	4.013.289.397	99,34%
Belanja Barang	9.170.560.000	8.885.739.879	96,89%
Belanja Modal	67.500.000	66.892.963	99,10%
Total Belanja Kotor	13.277.856.000	12.965.922.239	97,65%
Pengembalian Belanja	-	6.796.978	0,00%
Jumlah	13.277.856.000	12.972.719.217	97,70%

Dibandingkan periode 31 Desember 2021 realisasi belanja periode yang berakhir pada tahun sebelumnya 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar 20,79 persen dibandingkan realisasi dengan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya Kegiatan Pemberdayaan PMI Purna dan Keluarga
2. Adanya Program Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan CPMI
3. Adanya Kegiatan Sosialisasi Pekerja Migran Indonesia
4. Adanya Refocussing dan Pemotongan Anggaran;
5. Adanya Realisasi Belanja Modal

Perbandingan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan periode yang berakhir 31 Desember 2020

URAIAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	4,006,492,419	4,401,547,659	(8,98)
Belanja Barang	8,885,739,879	6,327,187,989	40,44
Belanja Modal	66,892,963	-	100,00
Jumlah	12,959,125,261	10,728,735,648	20,79

Belanja Pegawai
Rp4.006.492.419

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp4.006.492.419 dan Rp4.401.547.659 Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 8,98 persen dari realisasi belanja pada periode yang berakhir 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Tidak adanya pembayaran THR Tunjangan Kinerja
2. Adanya 2 orang pegawai pensiun
3. Tidak dibayarkannya Uang makan dan tunjangan Kinerja Bulan Desember
4. Gaji Kepala Balai masih dibayarkan oleh Mabes Polri dan hanya dibayarkan tunjangan jabatannya.

Perbandingan Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan TA. 2020

URAIAN	REALISASI PER 31 DES 2021	REALISASI PER 31 DES 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2,238,654,974	2,217,982,976	0.93
Belanja Pembulatan Gaji PNS	32,991	31,400	5.07
Belanja Uang Makan PNS	268,931,000	363,748,000	(26.07)
Uang Lembur PNS	48,500,000	16,039,000	202.39
Tunjangan Kinerja PNS	1,457,170,432	1,803,746,413	(19.21)
Jumlah Belanja Kotor	4,013,289,397	4,401,547,789	(8.82)
Pengembalian Belanja Pegawai	(6,796,978)	(130)	5,228,344.62
Jumlah Belanja	4,006,492,419	4,401,547,659	(8.98)

Belanja Barang
Rp8.885.739.879

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan TA. 2020 adalah masing-masing sebesar Rp8.885.739.879 dan Rp6.327.187.989. Realisasi Belanja Barang Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 mengalami kenaikan 40,44 persen dari Realisasi Belanja Barang periode yang berakhir 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan adanya kegiatan Pemberdayaan PMI Purna, Kegiatan Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan PMI yang Tahun sebelumnya kegiatan tersebut tidak dapat realisasi karena Pandemi Covid dan Refocussing, sehingga belanja jasa, biaya perjalanan dinas dan barang konsumsi naik cukup signifikan dan Belanja Pemeliharaan untuk mengefisienkan sisa anggaran diakhir tahun.

*Perbandingan Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan
TA. 2020*

URAIAN	Untuk periode yang berakhir 31 Des 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	2,774,752,332	2,619,053,681	5.94
Belanja Barang Operasional -Pen.Pandemi Covid-19	90,961,500	59,564,066	52.71
Belanja Barang Non Operasional	1,184,019,368	621,244,627	90.59
Belanja Barang Non Operasional-Penanganan Covid-19	189,438,200	27,502,500	588.80
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	147,162,850	82,889,460	77.54
Belanja Jasa	2,030,183,791	1,864,879,414	8.86
Belanja Pemeliharaan	391,095,170	238,448,789	64.02
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2,078,126,668	813,605,452	155.42
Jumlah Belanja	8,885,739,879	6,327,187,989	40.44
Pengembalian	0	0	-
Jumlah Belanja	8,885,739,879	6,327,187,989	40.44

Rincian Belanja Barang Khusus Penanganan Pandemi Covid-19 TA 2021

AKUN	URAIAN	VOL	PAGU ANGGARAN Rp	REALISASI Rp	PENYERAPAN %
3894.EAC.001.051.F.521131	Belanja Barang Operasional-Penanganan Covid-19				
	Masker	450 OK	31,500,000	30,870,000	98.00
	Masker Merah Putih	90 Org	7,110,000	7,020,000	98.73
	Hand Sanitizer	270 Botol	9,720,000	9,666,000	99.44
	Masker Layanan Kantor	32 Box	2,464,000	2,400,000	97.40
	Hand Sanitizer Layanan Kantor	32 Botol	1,216,000	1,216,000	100.00
	Sarung Tangan Layanan Kantor	30 Box	1,569,000	1,500,000	95.60
Jumlah			53,579,000	52,672,000	98.31
3894.EAC.001.051.F.521241	Belanja Barang Non Operasional-Penanganan Covid-19				
	Biaya Tes Antigen	270 OK	54,000,000	45,937,200	85.07
	Biaya PCR	90 OK	40,500,000	24,555,000	60.63
	Daya Tahan Tubuh	90 PKT	80,640,000	78,597,000	97.47
Jumlah			175,140,000	#####	85.13
Jumlah Output			228,719,000	201,761,200	88.21
4587.EAA.002.002.H.521131	Belanja Barang Operasional-Penanganan Covid-19				
	Pembelian Vitamin dan Penambah Daya Tahan Tubuh	1 PKT	2,351,000	2,234,000	95.02
	Disinfektan	10 DRGN	1,995,000	1,995,000	100.00
	Masker	435 BOX	27,666,000	27,666,000	100.00
	Hand Sanitizer	435 BTL	6,438,000	6,394,500	99.32
Jumlah			38,450,000	38,289,500	99.58
4587.EAA.002.002.H.521241	Belanja Barang Non Operasional-Penanganan Covid-19				
	Biaya Tes Antigen	100 ORG	20,000,000	24,833,000	124.17
	Biaya PCR	33 ORG	20,460,000	15,516,000	75.84
Jumlah			40,460,000	40,349,000	99.73
Jumlah Output			78,910,000	78,638,500	99.66
TOTAL SEMUA			307,629,000	280,399,700	91.15

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp66.892.963 dan Rp0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu untuk periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 100,00 persen dibandingkan Tahun 2020 hal ini disebabkan BP3TKI Bandung (UPT BP2MI) merealisasikan belanja modal berupa Komputer dan kamera Sebagai penunjang Kinerja dan aktifitas kantor

Perbandingan Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan Tahun 2020

URAIAN JENIS BELANJA	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66,892,963	0	100.00
Jumlah Belanja Kotor	66,892,963	0	100.00
Pengembalian	0	0	100
Jumlah Belanja	66,892,963	0	100.00

Persediaan
Rp138.747.773

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp138.747.773 dan Rp139.622.123.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2021 dan 2020

Persediaan	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020
Barang Konsumsi	138.747.773	139.622.123
Jumlah	138.747.773	139.622.123

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tanah Rp8.573.442.000

C.2. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki BP3TKI Bandung (UPT BP2MI) Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp8.573.442.000 dan Rp8.573.442.000, tidak ada mutasi tanah pada tahun 2020.

Tanah seluas 943,00 M² terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 587 Rt.03 Rw.09 Kel. Binong Kec. Batununggal Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah TA. 2021

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	943 m2	Jl. Soekarno Hatta No. 587 Bandung 40287	8.573.442.000
Jumlah			8.573.442.000

Peralatan dan Mesin
Rp5.618.622.198

C.3. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp5.618.622.198 dan Rp5.634.065.741. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	5,634,065,741
Mutasi Tambah:	286,892,963
Pembelian	66,892,963
Transfer masuk	220,000,000
Reklasifikasi masuk	0
Mutasi Kurang:	302,336,506
Extrakomptable	0
Reklasifikasi keluar	0
Aset Tetap Yang Tidak Digunakan	302,336,506
Saldo per 31 Desember 2021	5,618,622,198
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	-5,274,292,429
Nilai Buku per 31 Desember 2021	344,329,769

➤ Mutasi Tambah peralatan dan mesin berupa :

- Aset Tetap Yang digunakan transaksi pembelian peralatan dan mesin per 31 Oktober 2021 senilai Rp13.297.499 :

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga	Ket. BAST
1	2	3	4	5	6
1	Laptop (Asus A416EPO-VIPS551)	1	Rp 13,297,499	Rp 13,297,499	BA.01/SKU/BAST/X/2021, tanggal 08-10-2021
JUMLAH				Rp 13,297,499	

➤ Mutasi Tambah peralatan dan mesin berupa :

- Aset Tetap yang digunakan transaksi pembelian peralatan dan mesin per 31 November 2021 senilai Rp4.167.000 :

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga	Ket. BAST
1	2	3	4	5	6
1	Camera Digital (Logitech BCC950)	1	Rp 4,167,000	Rp 4,167,000	BAST21-000357, tanggal 03-11-2021
JUMLAH				Rp 4,167,000	

- Mutasi Tambah perlatan dan mesin berupa :
- Aset Tetap yang digunakan transaksi pembelian peralatan dan mesin per 31 November 2021 senilai Rp49.428.464 :

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga	Ket. BAST
1	2	3	4	5	6
1	Laptop (MSI Katana GF66i7)	2	Rp 17.973.800	Rp 35.947.600	099/SKU/SIT-BAST/X/2021 tanggal 21-10-2021
2	Kamera Digital (Sony RX100 V)	1	Rp 13.480.864	Rp 13.480.864	099/SKU/SIT-BAST/X/2021 tanggal 21-10-2021
JUMLAH				Rp 49.428.464	

- Mutasi Tambah Kendaraan Dinas berupa :
- Aset Tetap yang digunakan transfer Masuk per 01 Desember 2021 senilai Rp220.000.000 :

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga	Ket. BAST
1	2	3	4	5	6
1	Mobil Amulance (Mobil Ambulance)	1	Rp220,000,000	Rp220,000,000	BA.155/SU.KU/XI/2021 tanggal 12-11-2021
JUMLAH				Rp220,000,000	

C.4. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah Rp3.337.836.167 dan Rp3.337.836.167.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	3,337,836,167
Mutasi tambah :	-
Pembelian	-
Revaluasi	-
Transfer Masuk	-
Mutasi kurang :	-
Saldo per 31 Desember 2021	3,337,836,167
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	368,228,704
Nilai Buku per 31 Desember 2021	2,969,607,463

Adanya transaksi penambahan yaitu Perhitungan Revaluasi dari KPKNL Bandung untuk kantor Gedung dan Bangunan BP3TKI Bandung.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing (Rp5.642.521.133) dan (Rp5.667.078.751). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	8,573,442,000	0	8,573,442,000
2	Peralatan dan Mesin	5,618,622,198	5,274,292,429	344,329,769
3	Gedung dan Bangunan	3,337,836,167	368,228,704	2,969,607,463
Akumulasi Penyusutan		17,529,900,365	5,642,521,133	11,887,379,232

Piutang Tagihan TP/TGR
Rp98.084.772.

C.6. Piutang Tagihan TP/TGR

Saldo Tagihan Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp98.084.772 dan Rp110.084.772. Rangkuman Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2021 tersaji pada tabel berikut :

Rincian Piutang Tagihan TP/TGR

Uraian	31 Des 2021	31 Des 2020	Kenaikan (Penurunan)
Piutang Tagihan TP/TGR	98.084.772	110.084.772	(10,90)
Jumlah	98.084.772	110.084.772	(10,90)

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih – Piutang
Jangka Panjang
Rp75.584.772

C.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp75.584.772 dan Rp73.269.772. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang macet karena pihak CV. Nugraha Pratama sudah tidak membayar piutang TGR tersebut dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Uraian	30 Nov 2021	31 Des 2020	kenaikan (penurunan)
Jangka Panjang	75.584.772	73.269.772	3,16
Jumlah	75.584.772	73.269.772	3,16

Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/TGR
(Netto) Rp22.500.000

C.8. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)

Saldo Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp22.500.000 dan Rp36.815.000.

Rangkuman Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) per 31 Desember 2021 tersaji pada table berikut :

Rincian Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Uraian	31 Des 2021	31 Des 2020	Kenaikan (penurunan)	%
Tagihan TP/TGR (Netto)	22.500.000	36.815.000	-14.315.000	(38,88)
Jumlah	22.500.000	36.815.000	-14.315.000	(38,88)

C.9. Aset Lain-lain

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp996.045.506 dan Rp987.599.000 . Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2020	987,599,000
Mutasi tambah:	302,336,506
- Reklasifikasi dari Aset tetap	302,336,506
Mutasi kurang:	293,890,000
- Penghapusan Nilai Gedung dan Bangunan	118,800,000
- Penghapusan Nilai Perlatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor)	175,090,000
Saldo per 31 Desember 2021	996,045,506
Akumulasi Penyusutan	982,545,506
Nilai Buku per 31 Desember 2021	13,500,000

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Penambahan adalah reklasifikasi atau penghentian peralatan dan mesin yang tidak dapat digunakan lagi seperti Kursi Metal sebanyak 5 (lima) Unit, Jam Mekanis 5 (lima) Unit, Jam Elektronik 5 (lima) Unit, Vacuum Cleaner 1 (satu) unit, AC Split 6 (enam) unit, Kamera Elektronik 3 (tiga), Tripod Camera 5 (lima) unit, Kamera Digital 1 (satu), Kamera Conference 3 (tiga) unit, Wireless Amplifier 1 (satu) unit, Finger Print 10 (sepuluh) unit, Digital Recording System 1 (satu) unit, Finger print Camera 4 (empat) unit, PC Unit 5 (lima) unit, Leptop 2 (dua) unit, Card rider 1 (satu) unit, Printer 9 (sembilan) unit, Scanner 2 (dua) unit, Hardisk Eksternal 11 (sebelas) unit, Lemari besi 1 (satu), Filing Cabinet 1 (satu) unit, Mesin Absensi 1 (satu) unit, Lemari kayu 1 (satu) unit, Meja kerja besi 1 (satu), Meja Kerja kayu 68 (enam puluh delapan) unit total semua senilai Rp302.336.506;
- Penghapusan Nilai Gedung dan bangunan Permanen senilai Rp118.800.000;
- Penghapusan Alat Angkutan Darat Bermotor berupa kendaraan bermotor Roda 4 (empat) sebanyak 2 unit dan Roda 2 (dua) senilai Rp175.090.000;

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.10. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah masing-masing Rp982.545.506 dan Rp889.751.000. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun. Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah	982.545.506	982.545.506	-
Jumlah	982.545.506	982.545.506	-

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

C.11. Utang Kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp166.723.828 dan Rp14.341.819. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada BP3TKI Bandung (UPT BP2MI) per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Uang Makan PNS Bulan Desember 2021	22,037,000	Pagu tidak mencukupi karena pemotongan
2	Tunjangan Kinerja PNS Bulan Desember 2021	127,744,275	Pagu tidak mencukupi karena pemotongan
3	Listrik Bulan Desember	10,317,376	Kwitansi Tagihan terbit di Bulan Januari 2022
4	Telepon	1,256,620	Kwitansi Tagihan terbit di Bulan Januari 2022
5	Langganan Air PDAM	19,500	Kwitansi Tagihan terbit di Bulan Januari 2022
6	Internet	5,349,057	Kwitansi Tagihan terbit di Bulan Januari 2022
	Jumlah	166,723,828	

Ekuitas

Rp11.895.403.171

C.12 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp11.895.403.171 dan Rp12.138.208.461 . Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Beban Pegawai
Rp4.155.614.042

D.1. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp4.155.614.042 dan Rp4.233.131.716. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

URAIAN JENIS BEBAN	31 DES 2021	31 DES 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	1.784.776.680	1.804.455.740	(1,09)
Beban Pembulatan Gaji PNS	32.593	31.474	3,56
Beban Tunjangan-Tunjangan	446.848.562	414.186.684	7,89
Beban Uang Makan	290.968.000	339.804.000	(14,37)
Beban Lembur	48.500.000	16.039.000	202,39
Beban Pegawai (Tunjangan Kinerja)	1.584.488.207	1.658.614.818	(4,47)
Jumlah	4.155.614.042	4.233.131.716	(1,83)

Beban Persediaan
Rp148.037.200

D.2. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp148.037.200 dan Rp86.240.335. Beban Persediaan merupakan Beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang habis pakai. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

URAIAN JENIS BEBAN	31 DES 2021	31 DES 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	148.037.200	86.240.335	71,66
Jumlah	148.037.200	86.240.335	71,66

D.3. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp6.272.615.577 dan Rp5.190.452.867. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena kenaikan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Kenaikan Beban Barang dan Jasa terjadi disebabkan bertambahnya pengiriman surat dinas pos pusat, belanja bahan naik karena pelaporan secara *offline* sehingga pengadaan dan penjilidan cukup banyak, honor operasional satuan kerja terealisasi karena dilaksanakannya kegiatan sosialiasi. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2021

URAIAN JENIS BEBAN	31 DES 2021	31 DES 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	2,620,211,332	2,461,478,794	6.45
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	8,549,000	6,574,887	30.03
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	145,992,000	151,000,000	(3.32)
Beban Barang Operasional - Penangan Covid-19	90,961,500	59,564,066	52.71
Beban Bahan	943,362,905	599,744,627	57.29
Beban Honor Output Kegiatan	6,500,000	0	100.00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	234,156,463	21,500,000	989.10
Beban Barang Non Operasional - Penangan Covid	189,438,200	27,502,500	588.80
Beban Langganan Listrik	165,950,088	147,885,818	12.22
Beban Langganan Telepon	13,351,267	3,706,052	260.26
Beban Langganan Air	255,000	386,300	(33.99)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	65,673,340	70,899,823	(7.37)
Beban Jasa Sewa	1,539,164,482	1,177,950,000	30.66
Beban Jasa Profesi	249,050,000	362,600,000	(31.32)
Beban Jasa Lainnya	0	99,660,000	100.00
Jumlah	6,272,615,577	5,190,452,867	20.85

Adapun rincian beban barang dan jasa untuk keperluan Covid-19 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Periode Berakhir 31 Desember 2021

No	Beban	Jumlah (Rp)	Keterangan	
			No. Kuitansi di BKU	Nama Toko/Penyedia
a	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19			
1	Masker Medis Onamed	30.870.000	39/KWI/TM/2021	CV. Tunas Mandiri
2	Hand Sanitizer Tube (Merk Softies)	7.020.000	39/KWI/TM/2021	CV. Tunas Mandiri
3	Disinfektan (Merk Jhonson)	9.666.000	39/KWI/TM/2021	CV. Tunas Mandiri
4	Masker 3D Srugical (Merk Softies)	2.400.000	47/KWI/TM/2021	CV. Tunas Mandiri
5	Hand Sanitizer (Merk Softies)	1.216.000	47/KWI/TM/2021	CV. Tunas Mandiri
6	Sarng Tangan Latex (Merk Everglove)	1.500.000	47/KWI/TM/2021	CV. Tunas Mandiri
7	Masker	36.055.500	002158	CV. Tunas Mandiri
8	Vitamin	1.536.500	002159	Borma
9	Vitamin	697.500	002160	Apotek Indrayasa
	Jumlah	90.961.500		

Rincian Beban Barang dan Jasa Periode Berakhir 31 Desember 2021

No	Beban	Jumlah (Rp)	Keterangan	
			No. Kuitansi di BKU	Nama Toko/Penyedia
b	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19			
1	Paket Immune Booster (Vit.C, Madu, Habbatusauda, Susu Cair)	77,382,000	38/KWI/TM/2021	CV. Tunas Mandiri
2	Goodie Bag	1,215,000	38/KWI/TM/2021	CV. Tunas Mandiri
3	Rapid Test (38 pegawai)	10,450,000	KU.000029.12.21	RSU Pindad
4	Test Antigen (36 pegawai)	3,960,000	KU.000021.12.21	RSU Pindad
5	Test PCR (2 Pegawai)	3,790,000	002187	Klinik Metro Medika
6	Tes Swab PCR	850,000	002156	Klinik Pratama Maryamah
7	Tes Swab Antigen	10,415,000	002155	Klinik Pratama Maryamah
8	Tes Swab PCR	5,494,000	002144	Klinik Pratama Maryamah
9	Tes Swab Antigen	2,570,000	002145	PMI Kab.Kuningan
10	Tes Swab PCR	3,700,000	001808	RSU Pindad
11	Tes Swab Antigen	14,870,000	001687	RSU Pindad
12	Tes Swab Antigen	1,620,000	000560	RSU Pindad
13	Tes Swab Antigen	105,000	000904	Rajawali Nusindo
14	Tes Swab PCR	907,000	000355	Rs. Advent
15	Tes Swab Antigen	3,730,000	000336	Edelweis
16	Tes Swab Antigen	1,740,000	1388	RS. Hermina
17	Tes Swab Antigen	85,000	002727	Klinik Lima Sehat
18	Tes Swab PCR	800,000	002306	Rs Kartika Kasih
19	Tes Swab PCR	2,430,000	002515	RSU Pindad
20	Tes Swab Antigen	7,093,200	002495	RS. MM Indramayu
	Jumlah	153,206,200		

No	Beban	Jumlah (Rp)	Keterangan	
			No. Kuitansi di BKU	Nama Toko/Penyedia
b	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19			
	Jumlah Sebelum	153.206.200		
21	Tes Swab PCR	460.000	C.328.47117SH	RS. Jakarta Medika
22	Tes Swab Antigen (1 Pegawai)	99.000	1630017	EI Shaddari Lab
23	Tes Swab Antigen (2 Pegawai)	198.000	CL/20210918/0317	Bumame Farmasi
24	Tes Swab Antigen (1 pegawai)	85.000	GRAHAYANA/VIII	kimia farma
25	Tes Swab Antigen (1 Pegawai)	70.000	662	Pratama kirana medika
26	Tes Swab Antigen (6 pegawai)	600.000	21.21.045	Klinik Jalur Farma
27	Tes Swab Antigen (1 Pegawai)	150.000	2109003490	Klinik almira
28	Tes Swab Antigen (1 Pegawai)	85.000	00397	Kimia Farma
29	Tes Swab Antigen (1 Pegawai)	75.000	00398	Klinik Dokter Kita
30	Tes Swab Antigen (5 Orang)	400.000	21.21.740	Klinik Jalur Farma
31	Tes Swab Antigen (1 Pegawai)	85.000	257/KLS/X/2021	Klinik Lima Sehat
32	Tes Swab Antigen (1 Pegawai)	99.000	003490	Klinik Pratama Riung ban
33	Tes Swab PCR	370.000	C/FRM/LAB-ADM/	Klinik Bunga Mas
34	Tes Swab Antigen	75.000	37/KUJP/KW/X/20	Klinik Jasa Farma
35	Tes Swab PCR	825.000	C.409.2111010013	Antigen Bandung
36	Tes Swab Antigen	198.000	2111050133	Klinik Utama Bunga mas
37	Tes Swab PCR	550.000	003940	Prima Husada
38	Tes Swab Antigen	8.000.000	003789	Rs Mata Bandung
39	Tes Swab Antigen (3 pegawai)	920.000	002185	Prima Husada
40	Tes Swab Antigen (1 pegawai)	400.000	002186	Cijawura Sehat
41	Tes Swab Antigen (1 pegawai)	125.000	002188	Metro Medika
42	Tes Swab Antigen (2 Pegawai)	460.000	002216	Prima Husada
43	Tes Swab Antigen (1 pegawai)	150.000	002237	Keluarga Sehat
44	Tes Swab Antigen (1 pegawai)	175.000	002267	Rancaekek Medika
45	Tes Swab PCR (1 Pegawai)	495.000	003326	Prima Husada
46	Tes Swab Antigen (1 pegawai)	99.000	003327	Klinik ArRidha
47	Tes Swab Antigen (11 Pegawai)	1.035.000	003328	Vaxa Antigen
48	Tes Swab Antigen (6 pegawai)	960.000	002305	Jalur Farma
49	Tes Swab Antigen (2 Pegawai)	400.000	002322 - 002323	Siti Azaria
50	Tes Swab Antigen (1 Pegawai)	185.000	002341	Lima Sehat
51	Tes Swab Antigen (2 Pegawai)	2.700.000	002404 - 002418	Jasa Farma
52	Tes Swab Antigen	5.250.000	003157	RSU Pindad
53	Tes Swab Antigen	80.000	003173	Rajawali Nusindo
54	Tes Swab Antigen (1 pegawai)	95.000	004216	Edelweis
55	Tes Swab Antigen (6 pegawai)	480.000	004252	Jalur Farma
56	Tes Swab PCR (15 Pegawai)	4.225.000	004255	Vaxa Antigen
57	Tes Swab PCR (6 orang)	1.650.000	004268	Rs Kartika Kasih
58	Tes Swab PCR (4 Pegawai)	1.100.000	004294	RS Pertamina
59	Tes Swab Antigen (1 pegawai)	85.000	004336	Klinik Lima Sehat
60	Tes PCR (1 Pegawai)	275.000	004337	Farmalab
61	Tes PCR (1 Pegawai)	275.000	004339	Lab klinik
62	Tes Swab Antigen (2 pegawai)	198.000	004351	VIP Medika 1
63	Tes PCR (2 Pegawai)	600.000	004356	Lab klinik
64	Tes Swab Antigen (4 pegawai)	396.000	004407	RS MM Indramayu
65	Tes Swab Antigen (2 pegawai)	170.000	004412	Farmalab
66	Tes PCR (2 Pegawai)	825.000	004418	Antigen Bandung
	Jumlah	189.438.200		

Beban
Pemeliharaan
Rp391.095.170

D.4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp391.095.170 dan Rp238.448.789. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan disebabkan karena alokasi anggaran pemeliharaan dan sebagian besar dari tahun sebelumnya dan Aset yang dipelihara lebih banyak karena dampak dari kerusakan sehingga perlu perbaikan. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	87.475.100	43.065.000	103,12
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	303.620.070	195.383.789	55,40
Jumlah	391.095.170	238.448.789	64,02

Beban Perjalanan
Dinas
Rp2.078.126.668

D.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.078.126.668 dan Rp813.605.452. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan Beban Perjalanan Dinas karena bertambahnya kegiatan sosialisasi Peluang Kerja dan Migrasi Aman. Rincian Beban Perjalanan Dinas periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	1,113,327,602	398,385,452	179.46
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	842,370,000	158,820,000	430.39
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	100.00
Beban Perjalanan Dinas - Penangan Pandemi COVID-19	0	16,200,000	0.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	122,429,066	240,200,000	(49.03)
Jumlah	2,078,126,668	813,605,452	155.42

Beban Penyusutan
Dan Amortisasi
Rp278.966.888

D.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp278.966.888 dan Rp360.528.583. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	30 NOVEMBER 2020	30 NOVEMBER 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	207.734.236	288.257.931	(27,93)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	69.894.652	69.894.652	0,00
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	1.338.000	2.376.000	(43,69)
Jumlah Penyusutan	278.966.888	360.528.583	(22,62)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	278.966.888	360.528.583	(22,62)

Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp2.315.000

D.7 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.315.000 dan Rp72.659.348. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

URAIAN JENIS BEBAN	31 DEEMBER 2021	31 DEEMBER 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - TP/TGR	2.315.000	72.659.348	- 96,81
Jumlah	2.315.000	72.659.348	- 96,81

Beban Pelepasan
Aset Non Lancar
Rp83.160.000

D.8 Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp83.160.000 dan Rp0. Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

URAIAN BEBAN PELEPASAN ASET NON LANCAR	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Kerugian Pelepasan Aset	83,160,000		0
Jumlah	83,160,000	0	0

Pendapatan dari
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya
Rp12.285.318

D.9 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp12.285.318 dan Rp6.121.844. Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

URAIAN PENDAPATAN dari KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020	NAIK (TURUN) %
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	1,924,500	2,524,104	0.76
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	10,360,000	2,593,000	4.00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	6,121,844	-
Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	12,284,500	11,238,948	1.09

**)Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO).*

D.10 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp1.611.241.100. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan Kerugian Persediaan Rusak/Usang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021. Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya periode yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

URAIAN BEBAN dari KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	31 DESEMBER TAHUN 2021	31 DESEMBER TAHUN 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	1,668,740	(100.00)
Beban Persediaan Rusak/Usak	0	1,609,572,360	(100.00)
Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	1,611,241,100	(100.00)

Penurunan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya ini disebabkan adanya koreksi kurang dari barang persediaan barang konsumsi yang dimana pada saat dilakukan pengirim ADK Persediaan dan ADK aplikasi Simak BMN ke Aplikasi SAIBA terjadi pemecahan yang semula Akun 39 terbagi menjadi 2 bagian yaitu 49 Kredit dan 59 Debet. Sehingga menimbulkan Beban Penyesuaian Nilai Persediaan.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp12.138.208.461

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas untuk pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp12.138.208.461 dan Rp13.995.430.426.

Defisit LO
Rp13.315.520.227

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2021 adalah sebesar Rp13.315.520.227 dan Rp12.600.186.346. Defisit LO merupakan selisih kurang antara defisit kegiatan operasional, surplus kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi Nilai Aset
Tetap/Lainnya Non
Revaluasi
Rp0

E.3 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp20.564.737.

Transaksi Antar
Entitas
Rp13.072.714.943

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp13.072.714.943 dan Rp10.722.399.644. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	31 DES 2021	31 DES 2020
Ditagihkan ke Entitas Lain	12,959,125,261	10,728,735,648
Diterima ke Entitas Lain	(106,410,318)	(17,117,104)
Transfer Masuk Belanja Modal	220,000,000	10,781,100
Jumlah	13,072,714,943	10,722,399,644

E.4.1 Diterima dari Entitas Lainnya (DDEL/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan Kas Negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 DKEL sebesar Rp12.959.125.261 dan Rp10.728.735.648 sedangkan DDEL untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp106.410.318 dan Rp17.117.104.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL, KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp220.000.000 dan Rp10.781.100 terdiri dari :

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai	
			31 DES 2021	31 DES 2020
1	Mobil Ambulance	Sekretaris Utama BP2MI	220,000,000	0
2	Peralatan dan Mesin	Sekretaris Utama BP2MI	0	10,781,100
Jumlah			220,000,000	10,781,100

Tidak ada transfer keluar untuk periode berakhir 31 Desember 2021 karena tidak ada perpindahan Aset maupun Persediaan.

Ekuitas Akhir

Rp11.895.403.177

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp11.895.403.177 dan Rp12.138.208.461.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian penting yang tercatat setelah tanggal neraca

1.1 Barang Persediaan KTKLN dan Perangkat Pendukungnya

Berdasarkan Undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri, TKI yang berangkat bekerja ke luar negeri wajib mempunyai Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) yang merupakan identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri. KTKLN diterbitkan oleh Pemerintah, dalam hal ini adalah BNP2TKI. Dalam rangka penerbitan KTKLN untuk TKI, sejak Tahun 2008 BNP2TKI melakukan pengadaan KTKLN serta *supplies* KTKLN dalam rangka pencetakan KTKLN.

Pada akhir tahun 2014, Presiden R.I. memberikan perintah secara lisan yang tidak mewajibkan lagi KTKLN bagi TKI untuk memenuhi aspirasi TKI. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian e-KTKLN, sejak bulan Agustus 2015 tidak lagi dilakukan pencetakan/penerbitan KTKLN bagi TKI. KTKLN diberikan dalam bentuk KTKLN Elektronik (e-KTKLN) yang menggunakan sidik jari *biometric* TKI dan terhubung dengan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN).

Akibat tidak digunakan lagi KTKLN maka dapat dikategorikan sebagai Persediaan Usang yaitu persediaan yang secara fisik masih bagus namun tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Berikut rincian *Supplies* KTKLN berdasarkan hasil Berita Acara Opname Fisik :

No	Uraian Barang	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	HDP-600 Retransfer Film #084033	19	2,205,500	41,904,500
2	HDP-5000 YMCK (500 images) 84051	82	2,420,000	198,440,000
3	HDP-5000 Film #84053 (Des-14)	62	1,881,000	116,622,000
4	HDP-600 Cleaning Kit #081593#	4	528,770	2,115,080
5	HDP.5000 Cleaning Kit #089200	78	539,000	42,042,000
6	HDP-600 Color Ribon YMCK #084011#	47	2,502,500	117,617,500
Jumlah		292	10,076,770	518,741,080

Penghapusan KTKLN serta Overlamine dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Barang	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	HDP-5000 Hologram Overlamine Customized	98	2,068,000	202,664,000
2	HDP-600 Overlamine Customized	69	2,502,500	172,672,500
3	KTKLN	24,453	29,260	715,494,780
Jumlah		24,620	4,599,760	1,090,831,280

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia nomor : B.449/KA/IX/2020 tanggal 30 September 2020 perihal Persetujuan Penghapusan/Pemusnahan/Pelelangan terhadap KTKLN dan Perangkat Pendukungnya dan Surat Deputi Bidang Penempatan dan Perlindungan Kawasan Asia dan Pasifik BP2MI nomor : B.201/PEN/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 perihal Proses Penghapusan KTKLN dan Perangkat Pendukungnya. Salah satu pointnya adalah agar KTKLN dan *Overlamine* harus dimusnahkan/dihapuskan dikarenakan terdapat logo BNP2TKI untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) UPT BP2MI Bandung telah mengajukan Permohonan Penghapusan/Pemusnahan Barang Persediaan tersebut untuk dapat dilakukan Penghapusan/Pemusnahan Barang Persediaan dimaksud sesuai dengan Surat Kuasa Pengguna Barang (KPB) UPT BP2MI Bandung nomor : B.908/UPTBP2MI-6/XI/2020 tanggal 26 November 2020 perihal Permohonan Persetujuan Penghapusan/Pemusnahan Barang persediaan KTKLN dan *Overlamine* pada UPT BP2MI Bandung.

F.2 REVALUASI ASET

Penilaian kembali atas aset tetap dimiliki oleh perusahaan (entitas). Hal ini dilakukan akibat adanya kenaikan nilai aset tetap di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan akibat dievaluasi

F.3 REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Kantor Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bandung adalah Bank BRI A/C 0005-01-001570-30-5 a.n. Bendahara Pengeluaran BP3TKI Bandung.

Surat Pengesahan pembukaan rekening Bendahara Pengeluaran BP3TKI Bandung dari KPPN Bandung I sesuai surat Nomor : S-297/WPB.13/KP.0121/2011 tanggal 24 Januari 2011.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian penting yang tercatat setelah tanggal neraca

F.2 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Tidak ada kejadian penting yang tercatat temuan dan tindak lanjutan temuan BPK.

F.3 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA AKRUAL

Tidak ada daftar informasi pendapatan dan belanja secara akrual

F.4 REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Kantor Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bandung adalah Bank BRI A/C 0005-01-001570-30-5 a.n. Bendahara Pengeluaran BP3TKI Bandung.

Surat Pengesahan pembukaan rekening Bendahara Pengeluaran BP3TKI Bandung dari KPPN Bandung I sesuai surat Nomor : S-297/WPB.13/KP.0121/2011 tanggal 24 Januari 2011.

F.5 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- a. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 197 Tahun 2021 tanggal 22 Juli 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan BP2MI Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Pada Satuan Kerja di Lingkungan Bada Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun Anggaran 2021.
- b. Keputusan Kepala Balai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bandung Nomor 60 Tanggal 02 Agustus 2021

Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan dan Penerima Barang/Jasa dan Pengelola Barang Milik Negara pada Kantor Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bandung maka pada tanggal 01 Januari 2021 telah dilakukan Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan. Perubahan Pengelola Keuangan untuk periode yang berakhir 01 Agustus 2021 di BP3TKI sebagai berikut :

No	Jabatan	Semula	Menjadi
1	Kuasa Pengguna Anggaran	Drs. Ade Kusnadi, M.M.	Erwin Rachmat, S.I.K.